

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2022



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certify that

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Juanda Nomor 8, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Anti-Bribery Management System

SNI ISO 37001 : 2016



Certificate No.	- G-95 - ISO124 - V - 2019
Original Date	19 May 2019
Issue Date Certificate	19 May 2019
1st Surveillance	14 August 2020
2nd Surveillance	20 May 2021
Planning to be Renewed	16 March 2022
Expiry Date Certificate	16 May 2022

ITS
BREKIDON

To verify the validity of this certificate please visit www.gsi.com or scan this barcode:

PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Ponds XI, Perum Gria Loka, Kav. II, No. 50, Ubung, Denpasar Timur, Bali - Indonesia
Telp : 0801-888657, Email : info@gsi.com, Website : www.gsi.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang merupakan implementasi tahunan dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini dapat menjadikan acuan kerja kami selama 1 (satu) tahun ke depan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Surabaya,

2021

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019.....	11
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN.....	11
RENSTRA	11
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	23
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR	27
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	41
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	41
3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	41
3.3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	53
BAB V PENUTUP	57
5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN.....	57
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021.	12
Tabel. 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.	26
Tabel. 2.3.2. Pencapaian Kinerja MCP Inspektorat Provinsi Jawa Timur.	26
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Timur.	28
Tabel 2.5.1. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2022 yang di akomodir.	40
Tabel 2.5.2. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2022 yang di tidak di akomodir.	40
Tabel 2.5.3. Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan.	40
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.	42
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.	44
Tabel 4.1. Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2022	54
Tabel 4.2. Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022	56

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Disamping itu menunjuk pada Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Inspektorat membuat dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renja perangkat Daerah merupakan penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang lebih detail dari rencana strategis 5 tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renja disusun sebagai pedoman kerja selama 1 tahun. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mendukung visi Gubernur terpilih yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Misi Gubernur yang merupakan rumusan umum mengenai langkah – langkah dalam mewujudkan visi.

Dalam pelaksanaannya Inspektorat mendukung Misi Gubernur yang ke 3 :

“Tata kelola pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.”

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tetap dikawal dan dijaga untuk mewujudkan *good governance* menuju *clean government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, di era pandemi Covid 19 ini, Jawa Timur juga menjadi Provinsi yang terdampak dari sisi kesehatan, sehingga mengalami krisis kesehatan masyarakat, dan tentunya juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Untuk menangani pandemi ini tentunya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, dan untuk menangani Covid, diperlukan dukungan finansial untuk menyokong proses pengendalian penyebaran Corona, sehingga perlu dilakukan refocussing anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka banyak hal yang harus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya dalam segala aspek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- a) Membantu Kepala Daerah untuk percepatan penanganan pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021 dengan memberikan pendapat terbaik terdapat pelaksanaan PPKM dan Penyerapan APBD Tahun 2021. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, menilai Kepatuhan Pemda dalam penyampaian LRA dan Laporan Posisi Kas Bulanan, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.
- b) Pengawasan PPKM Darurat/ Mikro yang disesuaikan dengan kriteria daerah masing-masing sehingga dapat terlaksana PPKM tersebut sesuai dengan kebijakan daerah terkait pelaksanaan PPKM. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain mengawal pembentukan posko di tingkat kelurahan/ desa, mengawasi jumlah pelanggaran protokol kesehatan selama periode pelaporan, mengawasi Kepala Daerah dan ASN yang tidak sesuai dengan kebijakan PPKM yang dibawa ke ranah hukum pidana, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait

penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.

- c) Pengawasan terhadap pemberian Vaksinasi. Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengawasi dari sisi jumlah target dan realisasi vaksinasi, serta menginventarisir permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat diberikan saran/ rekomendasi yang diberikan.
- d) Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Berusaha. Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap kebijakan daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pengawasan itu antara lain memantau implementasi terhadap aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (**OSS-RBA**) yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virius Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease.
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2021 dan kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah.
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1411/IJ tanggal 6 Juli 2021 perihal Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, yang didasarkan atas capaian/ realisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 serta proyeksi capaian hingga triwulan I tahun anggaran 2021 yang disesuaikan dengan perubahan kondisi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anggaran serta kondisi lainnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2022;
2. Sebagai dasar untuk menentukan target capaian Tahun 2022;
3. Sebagai dasar untuk menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022;
4. Sebagai pedoman arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Bab II ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020.

Disamping itu bab ini berisi tentang prakiraan capaian kinerja pada tahun berlalu yaitu Tahun 2020 (periode Januari s.d. Desember 2020), dan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat, yang diharapkan akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjabaran mengenai prioritas Inspektorat yang mendukung prioritas provinsi, prioritas Inspektorat terkait dengan tugas fungsi reguler, serta program dan kegiatan di tahun 2022.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019



2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan target tahun ketiga dari Periode Renstra tahun 2019-2024. Dalam perjalanannya dokumen RPJMD mengalami perubahan, sehingga menyebabkan adanya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dimulai dari Rancangan Awal Perubahan Renstra 2019 – 2024, yang sedang berjalan prosesnya di awal tahun 2021. Sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 pun juga harus menyesuaikan dengan perubahan dari RPJMD 2019 – 2024 maupun perubahan Renstra 2019 – 2024. Oleh karena itu diperlukan untuk melakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 dilakukan sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, walaupun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak mencapai 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2021 (periode Januari s.d. Maret 2021) diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatan akan sesuai dengan target Rencana Kerja Tahun 2021.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dan prakiraan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021.

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						FUNGSI PENUNJANG URUSAN									
						PENGAWASAN									
3	0	0	0	0	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100					100	100
3	0	0	0	0	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	75	100					100	133,333
3	0	0	0	0	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100					100	100
3	0	0	0	0	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	75	100					100	133,333
1	2	0	0	0	012	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	skor kepuasan pegawai inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	75	100					100	133,333
3	0	0	0	0	07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Presentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100					100	100
3	0	0	0	0	0701	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	7	10					10	142,857

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	0	0	0	0	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	3	5					5	166,667
						Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	120	120					120	100
3	0	0	0	0	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggara n pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggara an pemerintaha n yang disusun tepat waktu	100	100					100	100
3	0	0	0	0	Penyusunan dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	6	6					6	100
3	0	0	0	0	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	jumlah dokumen pelaksanaan dan evaluasi penyelenggara an pemerintaha n	1	1					1	100
3	0	0	0	0	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	jumlah update database perangkat daerah	1	25					25	2500
3	0	0	0	0	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1	2					2	200
3	0	0	2	0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	70	0,5					0,5	0,71429
3	0	0	2	0	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat	70	20					20	28,5714

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK	60	60					60	100
							Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Irjen	100	100					100	100
3	0	0	2	0		Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Dokumen Kebijakan Pengawasan	1	1					1	100
3	0	0	2	0		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<i>Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS</i>	100	100					100	100
3	0	0	2	0		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ PKS	1	1					1	100
3	0	0	2	0		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	2	2					2	100
3	0	0	2	0		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	SOP Pengawasan	2	2					2	100
3	0	0	7	0		Program Pencegahan Korupsi	Penilaian WBK WBBM (Jumlah PD)	2	8					8	400
3	0	0	7	0		Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Indeks integritas Provinsi Jawa Timur	6	7					7	116,667
3	0	0	9	0		Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	<i>Prosentase Kerugian Daerah</i>	1,2							
3	0	0	9	0		Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT	Obyek Pemeriksaan	125	125					125	100

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	0	0	9	0		Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler (2018 & 2019)	Obyek Pemeriksaan	116	116					116	100
3	0	0	9	0		Pemeriksaan tujuan tertentu	Obyek Pemeriksaan	6	6					6	100
3	0	0	9	0		Pemeriksaan Khusus	Obyek Pemeriksaan	4	4					4	100
3	0	0	9	0		Pemeriksaan Kasus	Obyek Pemeriksaan	16	16					16	100
3	0	0	9	0		Review Laporan Keuangan	Laporan Review	5	5					5	100
3	0	0	9	0		Evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	55	55					55	100
3	0	0	9	0		Evaluasi LAKIP	Jumlah SKPD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan nilai A	60	60					60	100
3	0	0	9	0		Telaah sejawat hasil pengawasan	Paparan Hasil Pemeriksaan	12	12					12	100

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	0	0	1		Program Pelayanan Keseekretariatan Inspektorat	Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai	85		91,22	76			76	89,4118
							Persentase realisasi anggaran	90			76			76	84,4444
							Indeks profesionalita s ASN	85			75			75	88,2353
3	0	0	0	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	30		42,3	6			6	20
3	0	0	0	0	0	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	70		89,77	14			14	20
3	0	0	0	0	0	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian	30		91,35	6			6	20
3	0	0	0	1	6	Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu	90		80,32	25			25	27,7778
3	0	0	0	1	0	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan reviu	25		72,04	4			4	16
3	0	0	0	1	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu	45		88,8	8			8	17,7778
3	0	0	0	1	0	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu	20		76,12	3			3	15
3	0	0	0	2	0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	80		91,05	127			127	158,75
3	0	0	0	2	0	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	80		94,74	123			123	153,75
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	80			143			143	178,75

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	80			143			143	178,75
3	0	0	2	0	0	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen pelaksanaa n kegiatan	20		83,37	11			11	55
3	0	0	1	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah	50		88,53	147			147	294
3	0	0	1	0	0	Pengawasan Reguler PD/ UPT	Obyek Pemeriksaan	450		98,56	739			739	164,222
3	0	0	1	0	0	Monev Pertanggungjaw aban Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan	300		99,89	418			418	139,333
3	0	0	1	0	0	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan	225		85,63	187			187	83,1111
3	0	0	1	0	0	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi	60		65,82	10			10	16,6667
3	0	0	1	0	0	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi	100		46,26	12			12	12
3	0	0	1	0	0	evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	190		94,28	76			76	40
3	0	0	1	0	0	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	60		36,03	92			92	153,333

Kode						Urusan/ Bidang Ururan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
3	0	0	7			Program Pencegahan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100		87,44	86			86	86
3	0	0	7	0		Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	20		42,4	0			0	0
3	0	0	7	0		Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/satker	10		86,76	2			2	20
3	0	0	7	0		Kerja Sama APIP-APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	10		98,84	1			1	10
							Rapat kerja pembahasan kasus/pengaduan masyarakat	20							0
3	0	0	7	0		Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	5		79,43	1			1	20
3	0	0	7	0		Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi	20		59,25	4			4	20
3	0	0	7	0		Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei	30							0
3	0	0	7	0		Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	40		83,3	10			10	25
							Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	60			12			12	20
3	0	0	7	0		Audit berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal	10		80,82	2			2	20

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome s) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Program Perangk at Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (maret 2021)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
3	0	05	#		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100			94			94	94
3	0	05	#	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	500			129			129	25,8

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program pengawasan;
- perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi :

a. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Inspektur Pembantu I;

c. Inspektur Pembantu II;

d. Inspektur Pembantu III;

e. Inspektur Pembantu IV;

f. Inspektur Pembantu Khusus; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2020 dan 2021 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka peningkatan level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dalam rangka mempertahankan/meningkatkan Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan:

1. Pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur;

2. Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai *supporting system*, turut berperan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu dengan :
 - Mensupport kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan efektif karena keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan tugas jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan.
 - Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggambarkan kesesuaian antara anggaran pengawasan di Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja pengawasan.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal/ Eksternal, BPKP RI dan BPK RI, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Desk/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, BPKP dan BPK RI pada perangkat daerah terperiksa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk penyelesaian tindak lanjutnya hingga mendapatkan status Tuntas.
 - Monitoring dan evaluasi kinerja di 38 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur Program Prioritas Pembangunan, seperti kinerja penanganan covid-19, percepatan penyerapan APBD.
3. Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang diukur dengan persentase Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh kategori \geq Tinggi dan Persentase Penurunan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Rendah;
4. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dilakukan sosialisasi tentang gratifikasi dan pencegahannya;

5. Sebagai tindak lanjut terhadap Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Evaluasi Pelayanan Publik, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretaris Tim Daerah, melalui penilaian dan penetapan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Provinsi Jawa Timur. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM diawali pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT Jembatan Timbang di seluruh Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) pada tahun 2012. Pada Tahun 2020 hanya 1 (satu) Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBM yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN. Klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator sasaran 1 :

Total Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam hal memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya. Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja ke seluruh ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program;
3. Mekanisme cascade kinerja yang berpedoman pada proses bisnis organisasi;
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan :

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, Perangkat Daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan Perangkat Daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial.
2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 - 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini.
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
4. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan Inspektorat Provinsi Jawa Timur agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.
5. Inspektorat telah memiliki SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini merupakan komitmen untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan. Standar ISO ini dapat digunakan untuk mencegah, mendeteksi serta menindaklanjuti penyuapan.
6. Inspektorat telah membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terintegrasi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel. 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/ PMD18/ 2020/ RAKOERTEK	MCP	Target Renstra PD				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	v					76	76	76	76	76	76	76	76	
	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2		v				81	81	81	81	81	81	81	81	

Tabel. 2.3.2 Pencapaian Kinerja MCP Inspektorat Provinsi Jawa Timur

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/ PMD18/ 2020/ RAKOERTEK	MCP	Target Renstra PD				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1.	Kecukupan APIP	v				v									
2.	Pelatihan APIP		v			v									
3.	APIP Bersertifikat					v									
4.	Kesesuaian dengan Regulasi					v									
5.	Efektivitas Anggaran					v									
6.	Laporan Hasil Probity Audit					v									
7.	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus					v									
8.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal					v									

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Jawa Timur	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76	%	85.464.418.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	Jawa Timur	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76	%	85.464.418.000,00	
			Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	81	%				Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	81	%		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase indikator program yang tercapai	88	%	69.518.415.377,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase indikator program yang tercapai	88	%	69.518.415.377,00	
			Persentase realisasi anggaran	94	%				Persentase realisasi anggaran	94	%		
			Indeks Profesionalitas ASN	83	Nilai				Indeks Profesionalitas ASN	83	Nilai		
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85	%	17.582.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85	%	17.582.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
XXX011 0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dok ume n	3.680.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokume n	3.680.000,00	
XXX011 0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1	Dok ume n	1.985.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1	Dokume n	1.985.000,00	
XXX011 0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dok ume n	1.985.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokume n	1.985.000,00	
XXX011 0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA	1	Dok ume n	1.870.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA	1	Dokume n	1.870.000,00	
XXX011 0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dok ume n	1.990.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokume n	1.990.000,00	
XXX011 0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen capaian kinerja	4	Dok ume n	3.444.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen capaian kinerja	4	Dokume n	3.444.000,00	
XXX011 0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	4	Dok ume n	2.628.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	4	Dokume n	2.628.000,00	
XXX011 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pertanggungj awaban keuangan	1 2	Lap ora n	62.765.583.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pertanggungja waban keuangan	12	Lapora n	62.765.583.000, 00	
XXX011 0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Lap oran	61.404.289.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Laporan	61.404.289.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
XXX011 0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Lap oran	1.332.430.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	1.332.430.000,00	
XXX011 0203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12	Lap oran	17.673.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12	Laporan	17.673.000,00	
XXX011 0204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	1	Lap oran	2.080.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	1	Laporan	2.080.000,00	
XXX011 0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen keuangan SKPD	2	Dok ume n	1.308.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen keuangan SKPD	2	Dokume n	1.308.000,00	
XXX011 0206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	1	Dok ume n	2.199.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	1	Dokume n	2.199.000,00	
XXX011 0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan	12	Lap oran	4.814.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan	12	Laporan	4.814.000,00	
XXX011 0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan prognosis	1	Lap oran	790.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan prognosis	1	Laporan	790.000,00	
XXX011 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen ketatausahaa n dan kepegawaian	12	Lap ora n	943.394.997,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	Lapora n	943.394.997,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
XXX011 0501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Laporan Presensi Pegawai	12	Lap oran	43.475.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Laporan Presensi Pegawai	12	Laporan	43.475.000,00	
XXX011 0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1	pak et	145.380.306,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1	paket	145.380.306,00	
XXX011 0503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Lap oran	1.546.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Laporan	1.546.000,00	
XXX011 0504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1	Lap oran	18.760.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1	Laporan	18.760.000,00	
XXX011 0505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan SKP	12	Lap oran	205.186.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan SKP	12	Laporan	205.186.000,00	
XXX011 0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Ora ng	272.548.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	272.548.000,00	
XXX011 0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Kali	256.499.691,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Kali	256.499.691,00	
XXX011 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	11	Dok um en	910.556.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	11	Dokum en	910.556.400,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
XXX011 0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1	Pak et	40.138.479,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	40.138.479,00	
XXX011 0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1	Pak et	253.719.506,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	253.719.506,00	
XXX011 0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Pengadaan	1	Pak et	130.710.823,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	130.710.823,00	
XXX011 0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan	1	Pak et	236.947.942,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan	1	Paket	236.947.942,00	
XXX011 0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Paket Pengadaan	40	Pak et	14.110.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Paket Pengadaan	40	Paket	14.110.000,00	
XXX011 0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan	8	Lap oran	233.744.650,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan	8	Laporan	233.744.650,00	
XXX011 0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	3	Dok ume n	1.185.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	3	Dokume n	1.185.000,00	
XXX011 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	5	Lap ora n	413.606.980,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	5	Lapora n	413.606.980,00	
XXX011 0705	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	1	pak et	219.508.630,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel	1	paket	219.508.630,00	
XXX011 0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Pak et	194.098.350,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Paket	194.098.350,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
XXX011 0709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung			0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung			0	
XXX011 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Dok um en	3.552.439.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Dokum en	3.552.439.200,0 0	
XXX011 0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pengiriman Dokumen	24	Kali	18.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pengiriman Dokumen	24	Kali	18.000.000,00	
XXX011 0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Pak et	538.329.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Paket	538.329.200,00	
XXX011 0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa	1	Pak et	83.430.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa	1	Paket	83.430.000,00	
XXX011 0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa	1	Pak et	2.912.680.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa	1	Paket	2.912.680.000,00	
XXX011 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Aset	12	Lap ora n	915.252.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Aset	12	Lapora n	915.252.800,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
XXX011 0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa	11	Pak et	93.456.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa	11	Paket	93.456.000,00	
XXX011 0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa	13	Pak et	520.196.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa	13	Paket	520.196.800,00	
XXX011 0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	Pak et	179.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	Paket	179.600.000,00	
XXX011 0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	2	Ged ung	122.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	2	Gedung	122.000.000,00	
60102	<u>PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN</u>		<u>Level Maturitas penyelenggara an SPIP Provinsi Jawa Timur</u>	3	Lev el	<u>9.281.757.044,00</u>	<u>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN</u>		<u>Level Maturitas penyelenggara an SPIP Provinsi Jawa Timur</u>	3	Level	<u>9.281.757.044,00</u>	
601021 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa	3	Nilai	7.962.073.044,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa	3	Nilai	7.962.073.044,00	
601021 0101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan	12	Pera ngk at Dae	985.444.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas	12	Perangk at Daerah	985.444.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja		rah				evaluasi sistem akuntabilitas kinerja				
			Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja	10	Oby ek				Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja	10	Obyek		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pengawasan kinerja	20	Oby ek				Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pengawasan kinerja	20	Obyek		
601021 0102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan	90	Oby ek	4.807.252.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan	90	Obyek	4.807.252.000,00	
601021 0103	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan reviu kinerja	2	Lap oran	96.066.000,00	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan reviu kinerja	2	Laporan	96.066.000,00	
			Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa	1	Lap oran				Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa	1	Laporan		
			Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Lap oran				Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran	1	Laporan		
601021 0104	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan	7	Lap oran	218.124.000,00	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan	7	Laporan	218.124.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
601021 0105	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (EKPPD)	30	Kab upat en/K ota	767.870.000,00	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	30	Kabupat en/Kota	767.870.000,00	
601021 0107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	77	%	1.087.317.044,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	77	%	1.087.317.044,00	
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	77	%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	77	%		
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI	80	%				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI	80	%		
6.01.02. 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	5	Jeni s Kegi atan	1.319.684.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	5	Jenis Kegiata n	1.319.684.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6010210202	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)	33	Obyek	1.319.684.000,00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)	33	Obyek	1.319.684.000,00	
60103	<u>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>		<u>Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur</u>	3	Level	<u>6.664.245.579,00</u>	<u>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>		<u>Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur</u>	3	Level	<u>6.664.245.579,00</u>	
60103101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	2	Dokumen	351.803.500,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	2	Dokumen	351.803.500,00	
6010310101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan	3	Kali	351.803.500,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan	3	Kali	351.803.500,00	
60103102	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85	%	6.312.442.079,00	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85	%	6.312.442.079,00	
6010310201	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek klinik konsultasi	12	Kabupaten/Kota	988.380.000,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek klinik konsultasi	12	Kabupaten/Kota	988.380.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi	20	Perangkat Daerah			Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi	20	Perangkat Daerah	
			Pendampingan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI	4	Kali			Pendampingan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI	4	Kali	
6010310202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Pencanangan WBKWBBM pada perangkat daerah/unit kerja	2	Perangkat Daerah	55.200.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pencanangan WBKWBBM pada perangkat daerah/unit kerja	2	Perangkat Daerah	55.200.000,00
6010310203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	1	Kali	3.824.527.079,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	1	Kali	3.824.527.079,00
			Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada Kabupaten/Kota	10	Kabupaten/Kota			Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada Kabupaten/Kota	10	Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah	8	Perangkat Daerah			Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah	8	Perangkat Daerah	
			Jumlah peringatan hari anti korupsi	1	Kali			Jumlah peringatan hari anti korupsi	1	Kali	

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
601031 0204	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016	1	Kali	1.444.335.000,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016	1	Kali	1.444.335.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH	1	Kali				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP- APH	1	Kali		
			Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)	6	Oby ek				Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)	6	Obyek		
			Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	1	Kali				Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	1	Kali		
			Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja APIP-APH pembahasan kasus/pengadua n masyarakat	30	Kali				Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja APIP- APH pembahasan kasus/pengaduan masyarakat	30	Kali		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pembahasan Anggaran Tahun 2022 bersama berbagai pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Musrenbang tersebut. Selain hal tersebut, dalam forum Musrenbang yang dilakukan melalui media Website musrenbang juga tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.5.1. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2022 yang di akomodir

N O	KABKOT A	USULAN KAB KOTA			HASIL VERIFIKASI				KETRANGA N
		Uraian Usula n	Target/Satua n	Lokas i	TARGET/SATUA N	Progra m	Kegiata n	Subkegiata n	
	NIHIL								

Tabel 2.5.2. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2022 yang di TIDAK DIAKOMODIR

NO	KABKOTA	USULAN KAB KOTA			ALASAN TIDAK DI AKOMODIR
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	
	NIHIL				

Tabel 2.5.3. Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan

NO	POKOK PIKIRAN DEWAN	URAIAN DUKUNGAN	LOKASI	BESARAN /VOLUME	PROGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	NIHIL								

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan program-program yang terdapat di Inspektorat ini dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- d. Survey Integritas dari KPK dan BPS untuk menilai tingkat integritas di Provinsi Jawa Timur. Survey dilakukan untuk memetakan resiko korupsi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2022 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN						SA TU AN	FORMULASI
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76	76	76	76	76	76	-	-
	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	81	81	81	81	81	81	-	<p>(Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP PD +Opini BPK RI) / 2.</p> <p>Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP 90 - 100 = AA 80 - 90 = A Nilai Opini BPK RI WTP = 100 WDP = 75 TMP = 50 Disclaimer = 25</p>

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain Terkait dengan visi Gubernur terpilih yaitu : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang diterjemahkan ke dalam misi Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris sehingga untuk mencapai visi misi gubernur tersebut diperlukan beberapa kegiatan baru untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur Jatim tersebut antara lain :

1. Adanya kegiatan dari KPK yang akan menilai tingkat integritas di Jawa Timur, sehingga Inspektorat menambahkan kegiatan Survey Penilaian Integritas.
2. Adanya program/ kegiatan dari KPK yang harus diakomodir antara lain terkait pungutan liar, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain kegiatan Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar
3. Adanya banyaknya pengaduan masyarakat kepada Inspektorat selaku APIP, sehingga dibutuhkan program/ kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri dan Kejari, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain Kerja Sama APIP-APH
4. Adanya banyak masalah dalam meng SPJ kan keuangan di desa, sehingga memunculkan ide untuk membuat program inovasi pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa.

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain Inspektorat memiliki 3 program dan 11 kegiatan 52 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran yang direncanakan pada tahun 2022 yaitu Rp. **85.464.418.000,00**. Tabel rencana program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	76	%	85.464.418.000,00	APBD		76	%	85.464.418.000,00
		Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2		81	%				81	%	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai		88	%	69.518.415.377,00			88	%	69.518.415.377,00
		Persentase realisasi anggaran		94	%				94	%	
		Indeks Profesionalitas ASN		83	Nilai				83	Nilai	
XXX01101	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		85	%	17.582.000,00			85	%	17.582.000,00
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		7	Dokumen	3.680.000,00			7	Dokumen	3.680.000,00
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		1	Dokumen	1.985.000,00			1	Dokumen	1.985.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan		1	Dokumen	1.985.000,00			1	Dokumen	1.985.000,00
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA		1	Dokumen	1.870.000,00			1	Dokumen	1.870.000,00
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan		1	Dokumen	1.990.000,00			1	Dokumen	1.990.000,00
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja		4	Dokumen	3.444.000,00			4	Dokumen	3.444.000,00
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja		4	Dokumen	2.628.000,00			4	Dokumen	2.628.000,00
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan		12	Laporan	62.765.583.000,00			12	Laporan	62.765.583.000,00
XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12	Laporan	61.404.289.000,00			12	Laporan	61.404.289.000,00
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	Laporan	1.332.430.000,00			12	Laporan	1.332.430.000,00
XXX0110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan		12	Laporan	17.673.000,00			12	Laporan	17.673.000,00
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah		1	Laporan	2.080.000,00			1	Laporan	2.080.000,00
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD		2	Dokumen	1.308.000,00			2	Dokumen	1.308.000,00
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP		1	Dokumen	2.199.000,00			1	Dokumen	2.199.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan		12	Laporan	4.814.000,00			12	Laporan	4.814.000,00
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis		1	Laporan	790.000,00			1	Laporan	790.000,00
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		12	Laporan	943.394.997,00			12	Laporan	943.394.997,00
XXX0110501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai		12	Laporan	43.475.000,00			12	Laporan	43.475.000,00
XXX0110502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		1	paket	145.380.306,00			1	paket	145.380.306,00
XXX0110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	Laporan	1.546.000,00			12	Laporan	1.546.000,00
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai		1	Laporan	18.760.000,00			1	Laporan	18.760.000,00
XXX0110505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP		12	Laporan	205.186.000,00			12	Laporan	205.186.000,00
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15	Orang	272.548.000,00			15	Orang	272.548.000,00
XXX0110511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1	Kali	256.499.691,00			1	Kali	256.499.691,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai		11	Dokumen	910.556.400,00			11	Dokumen	910.556.400,00
XXX0110601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan		1	Paket	40.138.479,00			1	Paket	40.138.479,00
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan		1	Paket	253.719.506,00			1	Paket	253.719.506,00
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan		1	Paket	130.710.823,00			1	Paket	130.710.823,00
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan		1	Paket	236.947.942,00			1	Paket	236.947.942,00
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan		40	Paket	14.110.000,00			40	Paket	14.110.000,00
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan		8	Laporan	233.744.650,00			8	Laporan	233.744.650,00
XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital		3	Dokumen	1.185.000,00			3	Dokumen	1.185.000,00
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana		5	Laporan	413.606.980,00			5	Laporan	413.606.980,00
XXX0110705	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel		1	paket	219.508.630,00			1	paket	219.508.630,00
XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		4	Paket	194.098.350,00			4	Paket	194.098.350,00
XXX0110709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				0					0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	Dokumen	3.552.439.200,00			12	Dokumen	3.552.439.200,00
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen		24	Kali	18.000.000,00			24	Kali	18.000.000,00
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3	Paket	538.329.200,00			3	Paket	538.329.200,00
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa		1	Paket	83.430.000,00			1	Paket	83.430.000,00
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa		1	Paket	2.912.680.000,00			1	Paket	2.912.680.000,00
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset		12	Laporan	915.252.800,00			12	Laporan	915.252.800,00
XXX0110901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa		11	Paket	93.456.000,00			11	Paket	93.456.000,00
XXX0110902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa		13	Paket	520.196.800,00			13	Paket	520.196.800,00
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		1	Paket	179.600.000,00			1	Paket	179.600.000,00
XXX0110909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara		2	Gedung	122.000.000,00			2	Gedung	122.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
60102	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</u>	<u>Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur</u>		3	Level	<u>9.281.757.044,00</u>			3	Level	<u>9.281.757.044,00</u>
60102101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa		3	Nilai	7.962.073.044,00			3	Nilai	7.962.073.044,00
6010210101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja		12	Perangkat Daerah	985.444.000,00			12	Perangkat Daerah	985.444.000,00
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja		10	Obyek				10	Obyek	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pengawasan kinerja		20	Obyek				20	Obyek	
6010210102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan		90	Obyek	4.807.252.000,00			90	Obyek	4.807.252.000,00
6010210103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu kinerja		2	Laporan	96.066.000,00			2	Laporan	96.066.000,00
		Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa		1	Laporan				1	Laporan	
		Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran		1	Laporan				1	Laporan	
6010210104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu terkait Laporan		7	Laporan	218.124.000,00			7	Laporan	218.124.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		keuangan									
6010210105	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		30	Kabupaten/Kota	767.870.000,00			30	Kabupaten/Kota	767.870.000,00
6010210107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur		77	%	1.087.317.044,00			77	%	1.087.317.044,00
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI		77	%				77	%	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI		80	%				80	%	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)		5	Jenis Kegiatan	1.319.684.000,00			5	Jenis Kegiatan	1.319.684.000,00
6010210202	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)		33	Obyek	1.319.684.000,00			33	Obyek	1.319.684.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
60103	<u>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>	<u>Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur</u>		3	Level	<u>6.664.245.579,00</u>			3	Level	<u>6.664.245.579,00</u>
60103101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan		2	Dokumen	351.803.500,00			2	Dokumen	351.803.500,00
6010310101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan		3	Kali	351.803.500,00			3	Kali	351.803.500,00
60103102	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		85	%	6.312.442.079,00			85	%	6.312.442.079,00
6010310201	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek klinik konsultasi		12	Kabupaten/Kota	988.380.000,00			12	Kabupaten/Kota	988.380.000,00
		Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi		20	Perangkat Daerah				20	Perangkat Daerah	
		Pendampingan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI		4	Kali				4	Kali	
6010310202	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pencanangan WBKWBMM pada perangkat daerah/unit kerja		2	Perangkat Daerah	55.200.000,00			2	Perangkat Daerah	55.200.000,00
6010310203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)		1	Kali	3.824.527.079,00			1	Kali	3.824.527.079,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada Kabupaten/Kota		10	Kabupat en/Kota				10	Kabupat en/Kota	
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah		8	Perangk at Daerah				8	Perangk at Daerah	
		Jumlah peringatan hari anti korupsi		1	Kali				1	Kali	
6010310204	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016		1	Kali	1.444.335.000,00			1	Kali	1.444.335.000,00
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH		1	Kali				1	Kali	
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)		6	Obyek				6	Obyek	
		Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur		1	Kali				1	Kali	
		Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja APIP-APH pembahasan kasus/pengaduan masyarakat		30	Kali				30	Kali	

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, disusunlah arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu: [1] Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; [2] Penguatan aksi anti-korupsi dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); [3] Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu; dan [4] Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Prioritas Provinsi Tahun 2022 yang juga terdiri dari 5 prioritas. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan prioritas provinsi ke-5 yaitu “PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA KESUKSESAN PELAKSANAAN PEMILU.” Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengajukan usulan kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi yaitu “SABER PUNGLI DAN GRATIFIKASI” yang diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan antara lain Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi; Verifikasi/ Reviu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur; dan Identifikasi Potensi Pungutan Liar.

Tabel 4.1 program kegiatan yang mendukung program prioritas provinsi dan program Icon Gubernur tahun 2022

Prioritas Provinsi	Nawabhakti	Program Icon	Uraian Keg Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Keg Nomenklatur	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
PP-7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Bhakti - 8 Jatim : Jatim Amanah : Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, Efektif, dan Anti Korupsi"	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Jatim	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			APBD	9.281.757.044	
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal			7.962.073.044	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		985.444.000	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		4.807.252.000	
						Reviu Laporan Kinerja		96.066.000	
						Reviu Laporan Keuangan		218.124.000	
						Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		767.870.000	

Prioritas Provinsi	Nawabhakti	Program Icon	Uraian Keg Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Keg Nomenklatur	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		1.087.317.044	
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			1.319.684.000	
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		1.319.684.000	

Tabel 4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Uraian Keg Prioritas Inspektorat	Program Nomenklatur	Keg Nomenklatur	Sub Keg Nomenklatur	Pagu Anggaran
	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Jatim	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			9.281.757.044
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		7.962.073.044
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	985.444.000
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4.807.252.000
				Reviu Laporan Kinerja	96.066.000
				Reviu Laporan Keuangan	218.124.000
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	767.870.000
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.087.317.044
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		1.319.684.000
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.319.684.000

BAB V PENUTUP



Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Penyusunan Program dan anggaran Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun sebagai *road map* dan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun 2022 sehingga arah kegiatan dan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2022 dapat lebih transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian misi dan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.”**

Surabaya,

2021

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT